

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada $5^{\circ}43'20,67''$ sampai $6^{\circ}47' 25,83''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}9' 48,02''$ sampai $110^{\circ}58'37,40''$ Bujur Timur. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Jepara terletak mulai dari 0 m sampai dengan 1.301 m. Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha. Kabupaten Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 183 desa dan 11 kelurahan, serta 1.041 RW dan 4.647 RT. Menurut klasifikasinya baik kelurahan maupun desa di Kabupaten Jepara termasuk swasembada. Kecamatan yang terluas adalah Keling yaitu 23.175,804 ha dan kecamatan yang terkecil adalah Kalinyamatan 2.369,834 ha. Sedangkan menurut penggunaannya: tanah sawah 26.291,056 ha dan tanah kering 74.122,133 ha.

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan hasil Susenas 2016 adalah sebanyak 1.107.973 jiwa yang terdiri dari 557.576 laki-laki (50,32 persen) dan 550.397 perempuan (49,68 persen), dimana sebaran penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (98.052 jiwa atau 8,85 persen) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Karimunjawa (8.823

jiwa atau 0,80 persen). Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, pada tahun 2016, kepadatan penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1.103 jiwa per km². Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara (3.136 jiwa per km²), sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Karimunjawa (124 jiwa per km²). Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 732.419 jiwa (66,10 persen) dan selebihnya 323.438 jiwa (29,19 persen) berusia di bawah 15 tahun dan 52.116 jiwa (4,70 persen) berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan besarnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Jepara adalah 512,76. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 513 orang penduduk usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten Jepara. Data yang digunakan rentang waktu analisis mulai tahun 2009-2016. Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 21 dan Microsoft Exel. Oleh karena itu, perlu dilihat perkembangan secara umum dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten Jepara.

4.2.1 Deskripsi Belanja Modal Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2016

Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi manambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja publik merupakan prioritas utama dalam belanja modal karena belanja publik berupa investasi fisik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobil), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulance), pembangunan jalan raya dan jembatan.

Data belanja modal pemerintah Kabupaten Jepara diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Belanja Modal Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2016

Tahun	Belanja Modal Kabupaten Jepara			
	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
2009	108,249,244,003	108,354,344,003	108,354,344,003	109,465,444,003
2010	117,255,418,438	117,555,418,438	118,267,418,438	119,766,418,438
2011	210,696,585,101	210,697,585,101	210,717,585,101	212,927,585,101
2012	316,317,279,000	316,317,279,000	317,327,279,000	317,327,279,000
2013	194,154,561,000	194,152,561,000	194,283,661,000	194,294,661,000
2014	222,537,665,000	222,537,665,000	223,549,665,000	224,651,665,000
2015	185,958,853,000	186,058,853,000	186,159,964,000	186,171,964,000
2016	395,862,618,167	395,862,618,167	395,862,618,167	397,078,618,167

Sumber: DPKAD Kabupaten Jepara, 2018, diolah kembali.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa belanja modal pemerintah Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 8 tahun, yaitu dari

tahun 2009 sampai 2016, menunjukkan model yang tidak teratur artinya mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2009 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 109,465,444,003, mengalami peningkatan pada tahun 2010 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 119,766,418,438, mengalami peningkatan pada tahun 2011 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 212,927,585,101, mengalami peningkatan pada tahun 2012 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 317,327,279,000, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2013 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 194,294,661,000, mengalami peningkatan pada tahun 2014 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 224,651,665,000, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 186,171,964,000, dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 397,078,618,167.

4.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam Kabupaten Jepara yang harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal yang menjadi bagian dari semangat program desentralisasi. Kemandirian fiskal ini diartikan sebagai semangat dalam membangun daerah dengan mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dari dana pihak luar. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara diperoleh dari Laporan

Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara			
	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
2009	71,890,959,343	71,914,959,343	71,914,959,343	71,919,859,343
2010	84,611,935,696	84,611,935,696	84,734,935,696	84,734,935,696
2011	100,712,014,200	100,712,014,200	100,712,014,200	100,712,014,200
2012	127,516,570,089	128,516,570,089	128,516,570,089	129,076,570,089
2013	133,772,055,195	133,776,055,195	133,776,055,195	133,778,055,195
2014	154,980,878,619	154,980,878,619	155,044,878,619	155,044,878,619
2015	270,247,907,727	270,247,907,727	270,252,907,727	270,252,907,727
2016	320,009,753,685	320,069,753,285	320,069,753,285	322,509,753,285

Sumber: DPKAD Kabupaten Jepara, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 8 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai 2016 setiap tahunnya memiliki pergerakan yang meningkat, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (PDRB) Kabupaten Jepara selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2009 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 71,919,859,343, mengalami peningkatan pada tahun 2010 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 84,734,935,696, mengalami peningkatan pada tahun 2011 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 103,642,014,200, mengalami peningkatan pada tahun 2012 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 129,076,570,089, mengalami peningkatan lagi pada tahun 2013 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 133,778,055,195, mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2014 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 155,044,878,619, mengalami

peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 270,252,907,727, dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 322,509,753,285.

4.2.3 Deskripsi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2015

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah yang bersangkutan dan diutamakan untuk membiayai urusan wajib berupa pelayanan dasar kepada masyarakat. Data Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Jepara diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara			
	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
2009	522,061,147,000	522,061,147,000	522,061,147,000	522,061,147,000
2010	529,580,873,000	529,580,873,000	529,580,873,000	529,580,873,000
2011	592,164,327,000	592,164,327,000	592,164,327,000	592,164,327,000
2012	712,740,462,000	712,740,462,000	712,740,462,000	712,740,462,000
2013	678,650,240,000	678,650,240,000	678,650,240,000	678,650,240,000
2014	295,922,888,000	517,865,054,000	739,807,220,000	739,807,220,000
2015	887,768,694,000	887,768,694,000	887,768,694,000	887,768,694,000
2016	1,000,373,359,000	1,000,373,359,000	1,000,373,359,000	1,000,373,359,000

Sumber: DPKAD Kabupaten Jepara, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 8 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai 2016 setiap tahunnya memiliki pergerakan yang tidak konstan, artinya mengalami peningkatan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2009 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 522,061,147,000, mengalami peningkatan pada tahun 2010 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 529,580,873,000, mengalami peningkatan pada tahun 2011 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 592,164,327,000, mengalami peningkatan pada tahun 2012 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 712,740,462,000, mengalami peningkatan lagi pada tahun 2013 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 678,650,240,000, mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2014 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 739,807,220,000, mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 887,768,694,000, dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 1,000,373,359,000.

4.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2016

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Data Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jepara diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara			
	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
2009	76,104,000,000	76,104,000,000	76,104,000,000	76,104,000,000
2010	64,454,400,000	64,454,400,000	64,454,400,000	64,454,400,000
2011	70,691,600,000	70,691,600,000	70,691,600,000	70,691,600,000
2012	76,460,530,000	76,460,530,000	76,460,530,000	76,460,530,000
2013	78,447,595,000	78,447,595,000	78,447,595,000	78,447,595,000
2014	81,294,110,000	81,294,110,000	81,294,110,000	81,294,110,000
2015	295,922,888,000	295,922,888,000	295,922,888,000	295,922,888,000
2016	339,310,214,684	339,310,214,684	339,310,214,684	339,310,214,684

Sumber: DPKAD Kabupaten Jepara, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 8 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai 2016 setiap tahunnya memiliki pergerakan yang konstan, artinya mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2010 yang mengalami penurunan. Terlihat pada tahun 2009 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 76,104,000,000, mengalami penurunan pada tahun 2010 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 64,454,400,000, mengalami peningkatan pada tahun 2011 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 70,691,600,000, mengalami peningkatan pada tahun 2012 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 76,460,530,000, mengalami peningkatan lagi pada tahun 2013 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 78,447,595,000, mengalami peningkatan pada tahun 2014 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 81,294,110,000, mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2015 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 295,922,888,000, dan mengalami

peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 triwulan 4 yaitu sebesar Rp 339,310,214,684.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier harus terpenuhi beberapa pengujian prasyarat analisis atau asumsi klasik, antara lain asumsi normalitas, multi-kolinearitas, dan heteroskedastisitas.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Adapun kriteria penilaiannya adalah jika nilai *Asymp Sig* < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal, jika *Asymp Sig* > 0,05 maka distribusi normal. Berikut adalah hasil pengolahan uji normalitas dengan menggunakan SPSS 21,

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

Variabel Penelitian	Kolmogorov-Smirnov Sig.	Kesimpulan
PAD	0.000	Data Tidak Normal
DAU	0.110	Data Normal
DAK	0.000	Data Tidak Normal
Belanja Modal	0.000	Data Tidak Normal

Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 21, 2018.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji *Kolmogorov-smirnov* hasil di atas, nilai signifikansi masing-masing variabel 0.000, kecuali pada variabel DAU yang nilainya 0.111 berdistribusi normal, yang

artinya variabel-variabel penelitian berdistribusi tidak normal karena $0.000 < 0.05$. Dikarenakan masih ada data tidak normal maka lakukanlah transformasi data dengan menggunakan transformasi logaritma (Ln).

Transformasi dengan menggunakan logaritma natural digunakan pada situasi dimana terdapatnya hubungan tidak linier antara variabel penjelas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Transformasi logaritma akan membuat hubungan yang tidak linier dapat digunakan dalam model linier. Selain itu, Transformasi logaritma dapat mengubah data yang pada awalnya berdistribusi menceng atau tidak berdistribusi normal menjadi atau mendekati distribusi normal. Adapun hasil transformasi logaritma adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Transformasi

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Sig.	Kesimpulan
PAD	0.065	Data Normal
DAU	0.076	Data Normal
DAK	0.052	Data Normal
Belanja Modal	0.057	Data Normal

Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 21, 2018.

Berdasarkan hasil transformasi di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-smirnov $> 0,05$ untuk variabel semua variabel, sehingga data layak untuk dilanjutkan dalam analisis.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara

variabel independen. Pada penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi antar variabel bebas. Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar 0,60, dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r < 0,60$).

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

		PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
PAD	Pearson Correlation	1	.777**	.906**	.709**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	32	32	32	32
DAU	Pearson Correlation	.777**	1	.774**	.606**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	32	32	32	32
DAK	Pearson Correlation	.906**	.774**	1	.478**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.006
	N	32	32	32	32
Belanja Modal	Pearson Correlation	.709**	.606**	.478**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.006	
	N	32	32	32	32

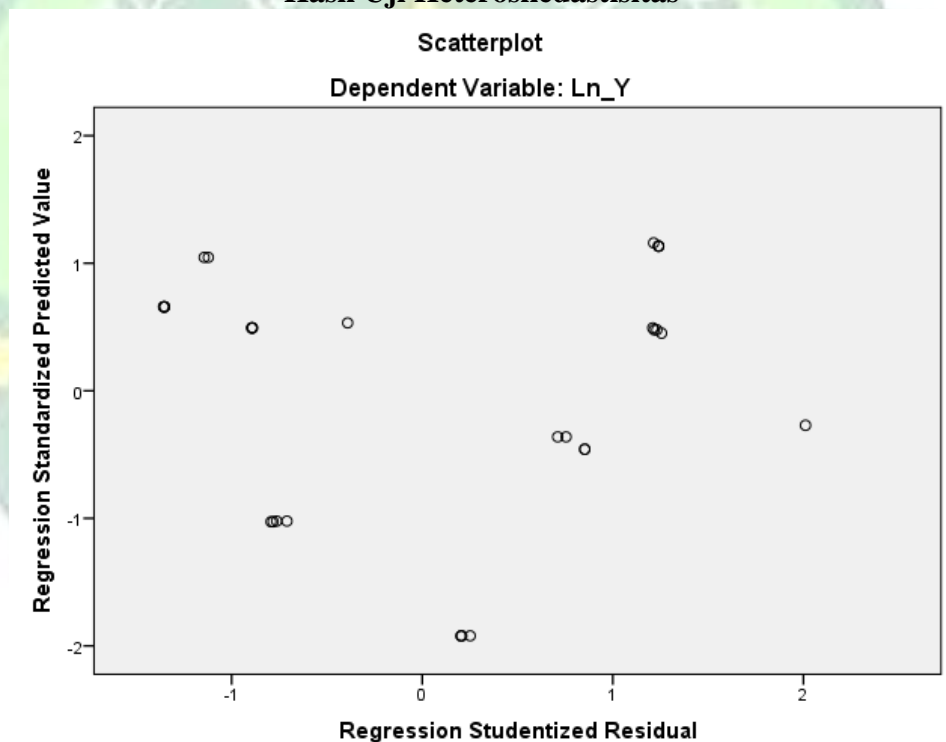
Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 21, 2018.

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antar variabel bebas > 0.60 , yang artinya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, kecuali pada variabel DAK yang memiliki nilai koefisien korelasi < 0.60 . Namun dikarenakan data dalam penelitian ini adalah data orisinil maka tidak ada variabel yang dibuang dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji model regresi terjadi ketidak-samaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan melihat Grafik *Plot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 21, 2018.

Pengujian juga menggunakan uji Gletser, dan berikut adalah hasilnya:

Tabel. 4.8
Hasil Uji Gletser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.855	0.958		-6.109	0.000
	Ln_X1	0.189	0.040	1.139	4.727	0.000
	Ln_X2	0.143	0.050	0.464	2.878	0.008
	Ln_X3	-0.105	0.031	-0.815	-3.402	0.002

Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 21, 2018.

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik tidak menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan juga berdasarkan hasil uji Gletser diketahui nilai signifikansi untuk masing-masing variabel nilainya < 0.05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis penelitian ini menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam pengujian hipotesis ini digunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara ketiga variabel dependen terhadap variabel independen. Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU dan DAK Belanja Modal Kabupaten Jepara, digunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DAK} + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

e = eror

Perhitungan analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	69044987195.79	58531528412.425		1.180	.248
PAD	1.762	.475	1.641	3.708	.001
DAU	.264	.124	.514	2.130	.042
DAK	1.269	.348	1.490	3.647	.001

Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 21, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai a sebesar 69044987195.79, b_1 sebesar 1.762, b_2 sebesar 0.264, b_3 sebesar 1.269.

Melihat hasil tersebut maka dapat disusun persamaan regresi:

$$Y = 69044987195.79 + 1.762 \text{ PAD} + 0.264 \text{ DAU} + 1.269 \text{ DAK} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 69044987195.79. Artinya, jika variabel Belanja Modal (Y) tidak dipengaruhi oleh ketiga variabel bebasnya atau PAD (X_1), DAU (X_2), dan DAK (X_3) bernilai nol, maka besarnya rata-rata PDRB akan bernilai 69044987195.79.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X_1 (PAD) bernilai positif, yaitu 1.762, menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara PAD (X_1) terhadap Belanja Modal (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap

pertambahan PAD (X_1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Belanja Modal (Y) sebesar 1.762.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X_2 (DAU) bernilai positif, yaitu 0.264, menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara DAU (X_2) terhadap Belanja Modal (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap pertambahan DAU (X_2) sebesar satu satuan akan menyebabkan kenaikan Belanja Modal (Y) sebesar 0.264.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X_3 (DAK) bernilai positif, yaitu 1.269, menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara DAK (X_3) terhadap Belanja Modal (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap pertambahan DAK (X_3) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Belanja Modal (Y) sebesar 1.269.

4.5 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya semakin

besar koefisien determinasi mendekati angka satu, maka semakin besar pula pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.804	0.647	0.609	57318476964.630

Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 21, 2018.

Hasil uji R^2 pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0.647. Hal ini berarti variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 64.7% sedangkan sisanya ($100\% - 64.7\% = 35.3\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

4.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penelitian ini digunakan pengujian parsial yaitu untuk menguji variabel independen PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Jepara. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$.

Kriteria pengujian adalah:

1. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, sebaliknya H_a ditolak.
2. Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, sebaliknya H_a diterima.

Tabel 4.11
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	69044987195.79	58531528412.425		1.180	.248
PAD	1.762	.475	1.641	3.708	.001
DAU	.264	.124	.514	2.130	.042
DAK	1.269	.348	1.490	3.647	.001

Sumber : Data Penelitian diolah dengan SPSS 21, 2018.

Berdasarkan hasil uji parsial dalam tabel di atas, diuji sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “*Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara.*” Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 1.762 dengan nilai $t_{hitung} = 3.708$ dengan probabilitas sebesar 0.001. Nilai t_{tabel} dengan nilai df: $n-k-1 = 32-3-1=28$ dengan taraf signifikansi sebesar 0.05 dengan uji satu arah didapatkan nilai sebesar 1.70113.

Berdasarkan hasil penghitungan hipotesis di atas, didapatkan nilai $t_{hitung} = 3.708$ lebih besar dari nilai t_{tabel} (1.70113), dengan taraf signifikansi 0.001 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Jepara, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan, “*Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara,” diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “*Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara.*” Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.264 dengan nilai $t_{hitung} = 2.130$ dengan probabilitas sebesar 0.042. Nilai $t_{hitung} = 2.130$ lebih besar dari nilai t_{tabel} (1.70113), dengan taraf signifikansi 0.042 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap variabel Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Jepara, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan, “*Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara,*” **diterima.**

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “*Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara.*” Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 1.269 dengan nilai $t_{hitung} = 3.647$ dengan probabilitas sebesar 0.001. Nilai $t_{hitung} = 3.647$ lebih kecil dari nilai t_{tabel}

(1.70113), dengan taraf signifikansi 0.001 lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Jepara, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan, “*Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara,*” **diterima.**

4.7 Uji Simultan

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada *level of significant* 5%.

Tabel. 4.12
Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	168331656190582360000000	3	56110552063527460000000	17.079	.000 ^b
Residual	91991418443254400000000	28	3285407801544799700000		
Total	260323074633836760000000	31			

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2018.

Besarnya nilai F_{tabel} dengan df penyebut sebesar 38 dan df pembilang sebesar 3 didapatkan nilai sebesar 2.85. Berdasarkan tabel di atas, pengaruh simultan variabel PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 17.079 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (2.85) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal atau dapat dikatakan bahwa variabel PAD, DAU

dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Jepara.

4.8 Pembahasan

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah pusat mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum. Daerah otonom mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonom adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah standar pelayanan bagi masyarakat daerah. Berdasarkan pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkup pemerintah daerah untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

4.8.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Jepara. Uji regresi yang telah dilakukan menunjukkan besaran signifikan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah $0.001 < 0,05$. Selain itu, hasil uji t menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $3.708 > t_{table} 1.70113$. Hal ini berarti sudah sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan, yaitu “*Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara.*”

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Martini, dkk, 2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Sejalan dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan PAD yang diterima.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapakan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pemrerintah daerah memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah semaksimal mungkin dengan tujuan untuk

meningkatkan pendapatan penerimaan daerah. Pemanfaatan potensi daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara pembelian dan perawatan infrastruktur. Contoh untuk daerah yang mempunyai potensi di sektor pariwisata, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara membangun sarana prasarana untuk menuju tempat pariwisata tersebut. Sehingga nantinya tempat pariwisata tersebut dapat memberikan pajak dan retribusi, yang merupakan penerimaan daerah. Dari penerimaan daerah tersebut, dapat dipergunakan untuk membiayai segala kewajiban dalam menjalankan pemerintahan, termasuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur lain.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut. Antara PAD dengan belanja modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula belanja modal.

4.8.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,042 lebih kecil dari α 0,05. Artinya, DAU memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal. Variabel DAU signifikan terhadap belanja modal ini disebabkan mungkin karena Pemerintah Kabupaten Jepara mengandalkan DAU yang nilainya cukup besar untuk membiayai semua pembiayaan dan belanja daerah terutama belanja modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Tolu, dkk (2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan DAU yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja modal akan meningkat.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan atas

dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bentuk dana perimbangan yang mempunyai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Setiap daerah memperoleh besaran DAU yang tidak sama, karena harus dialokasikan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berturut-turut dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami hubungan antara DAU dan alokasi belanja modal yaitu, alokasi DAU yang relatif besar diberikan terhadap pemerintah daerah yang mempunyai alokasi belanja modal yang besar, karena PAD dari pemerintah daerah tersebut masih belum mencukupi atau lebih kecil dari belanja modal.

DAU diharapkan menjadi sebuah modal dalam rangka menciptakan pemanfaatan yang lebih baik. Jika dana dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, misal infrastruktur atau layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) atau upaya perluasan lapangan pekerjaan, maka hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dengan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik maupun mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja di sejumlah sentra-sentra lapangan kerja. Dengan demikian, DAU menjadi penting bagi suatu daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan daerah.

4.8.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variable dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variable belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0.001 lebih kecil dari α 0,05. Artinya, DAK memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian Martini, dkk (2014) yang menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Selain dana alokasi umum, dana perimbangan lainnya adalah dana alokasi khusus. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Penggunaan DAK telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah tidak dapat membelanjakannya untuk kebutuhan lain. Daerah yang memenuhi kriteria pada setiap tahunnya akan diberikan DAK.

Penggunaan dana tersebut diutamakan untuk proses pembangunan yang menyangkut infrastruktur maupun sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Dengan DAK diharapkan terjadi pemerataan dalam pembangunan, serta pelayanan bagi masyarakat. Daerah yang keuangannya kurang mencukupi akan terbantu oleh DAK,

sehingga dapat meminimalisir kecemburuan antar daerah. Di samping itu pula diharapkan dapat mencapai standar pelayanan minimal bagi setiap daerah, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, DAK menjadi sangat penting fungsinya untuk mencapai kegiatan yang menjadi program nasional.

Hubungan antara DAK dengan belanja modal dapat dijelaskan yaitu, tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. Contoh untuk program kesehatan berupa program pelayanan dasar di daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk pembangunan, peningkatan, dan penyediaan sarana prasarana puskesmas didaerah pelosok. Program nasional pemerintah daerah tersebut termasuk dalam anggaran belanja modal. Sehingga ada keterkaitan DAK yang diperoleh tersebut ditunjukkan untuk program nasional yang merupakan belanja pegawai juga. Jadi semakin tinggi DAK yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat.

4.8.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil analisis secara simultan, menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal yang dijelaskan oleh nilai F nilai $F_{hitung} (17.079) > F_{tabel} (2.85)$ dan taraf signifikansinya 0,000 berada dibawah 0,05. Hal ini berarti

belanja modal pada pemerintah Kabupaten Jepara ditentukan oleh PAD, DAU dan DAK, yakni terlihat dari koefisien determinasi sebesar 64.7% dan selebihnya 35.3% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Hasil ini mendukung penelitian Tolu, dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Variabel Dependen Belanja Modal.

